

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : MUS IDA ANIS

Nim : 09.93.0043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Kamis,, 15 Maret 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Endang Wahyati Y, SP., MH

(.....)

2. dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD., MH.Kes., FINASIM


(.....)

3. MF Sustri Ayu Nalim, PhD

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Kamis,, 15 Maret 2012


(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM
PELAYANAN IMUNISASI PADA ANAK SEKOLAH DASAR DALAM
PROGRAM BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS)



Pembimbing Utama

Dr. Endang Wahyati Yustina, SH, MH Tanggal... 28 MARET 2012

Pembimbing Pendamping

dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD, MH.Kes, Finasim Tanggal... 27 MARET 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Pasca Sarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN IMUNISASI PADA ANAK SEKOLAH DASAR DALAM PROGRAM BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS)”**.

Program BIAS merupakan program pemerintah dibidang kesehatan, sebagai salah satu upaya *preventif* terhadap penyakit menular, dengan melibatkan tenaga kesehatan (perawat atau bidan) untuk melaksanakan hak, kewajiban dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kompetensi, standar profesi dan standar operasional prosedur, sehingga tenaga kesehatan (perawat atau bidan) perlu diberikan perlindungan hukum dalam rangka melaksanakan program pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS. Disamping itu, tenaga kesehatan (perawat atau bidan) merupakan sumber daya utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan

mempunyai peranan yang penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan, pada anak sekolah dasar dalam program BIAS.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc, sebagai Rektor Universitas Khatolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, dan dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dorongan semangat,

masukan serta bantuan atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD, MH.Kes, Finasim, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Sustru Ayu Nalim, PhD, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, yang telah tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek dan terutama dalam aspek hukum kesehatan.
8. Para staf sekretariat Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang, yang telah sabar memberikan segala bantuan administrasi dalam kegiatan belajar mengajar tanpa mengenal lelah dan kerjasamanya yang baik.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang khususnya angkatan XII tahun 2010 Semarang, atas segala bantuannya untuk selalu bersedia saling berbagi suka duka, pengalaman, ilmu pengetahuan dan memberi dorongan semangat serta kerjasamanya yang baik selama menempuh pendidikan pada

Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang.

10. Suami tercinta, La Ode Muhaymin, SPi, yang telah memberikan doa restunya, kesempatan, dukungan dan dorongan serta pengertiannya kepada penulis untuk mengambil dan menyelesaikan studi pada Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang. Juga kepada buah hatiku yang tersayang La Ode Achmad Yamin Arystu Muhaymin dan Wa Ode Yeyeng Senlistian Aristy Muhaymin, yang telah sabar menanti jauh terpisah dengan penulis sehingga menjadi pendorong semangat dan kekuatan dalam kehidupan penulis agar secepatnya menyelesaikan pendidikan ini.
11. Ibunda tercinta (almarhum) yang telah merawat, membesarkan dan memberikan dorongan serta dukungannya yang tak ternilai harganya kepada penulis dan jasanya tidak akan terlupakan. Juga ayahanda tercinta yang telah memberikan doa dan dukungannya serta kakak dan adik-adik yang terkasih yang telah memberikan dorongan moril dan bantuan materiil dan doa semuanya sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
12. Semua keluarga, rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang lain serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan nasehat, kritik dan saran serta semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa, karena keterbatasan dan kekurangan dari penulis sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun menuju kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi, bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan dan khususnya dibidang hukum kesehatan.



Semarang, Maret 2012

Penulis,

MUS IDA ANIS

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, MUS IDA ANIS, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 09.93.0043,

Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2012

Penulis,

MUS IDA ANIS

ABSTRAK

Setiap orang berhak untuk hidup sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Imunisasi merupakan program pemerintah yang didasarkan pada ketentuan hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. Program bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) adalah bentuk operasional dari imunisasi lanjutan pada anak sekolah dasar. Imunisasi dilakukan di sarana kesehatan pada tingkat puskesmas, dengan melibatkan tenaga kesehatan (perawat atau bidan) yang telah mengikuti pelatihan untuk tenaga petugas imunisasi. Pemberian vaksin ini memang aman tetapi bukan tanpa risiko, sehingga sebagian anak dapat mengalami reaksi yang dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) pada anak sekolah dasar dalam program BIAS.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*doctrinal legal approach*), dengan spesifikasi deskriptif analitis yaitu untuk memberikan gambaran hubungan antara perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat, maka secara umum tenaga kesehatan (perawat atau bidan) diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan kompetensi, standar profesi tenaga kesehatan dan standar operasional prosedur (SOP). Dan berdasarkan ketentuan hukum pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, maka anak sekolah dasar diberikan hak dan kewajiban oleh pemerintah untuk melaksanakan hak asasinya dalam memperoleh pelayanan imunisasi pada program BIAS. Namun dalam ketentuan hukum pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS, secara khusus belum dapat memenuhi adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (perawat atau bidan). Dalam rangka melaksanakan program pemerintah, yaitu pelayanan imunisasi pada anak sekolah dasar dalam program BIAS.

Kata kunci: Perlindungan hukum, perawat dan bidan, imunisasi, program BIAS.

ABSTRACT

Everyone has the right to health life and get safe, qualified, and affordable health services based on Pancasila, UUD 1945 other legislations. Immunization is a government program that is based on the provisions of the law in carrying out the functions and duties of government addressed to reduce morbidity and mortality of children. Program of school children immunization month (BIAS) is an operational form of further immunization for primary school children. Immunization is conducted at public health centers involving health staffs (nurses or midwives) who have been trained as immunization officers (Jurim). This vaccine is safe but not without risk, so that some primary school children may have reactions that may lead to co-occurring post-immunization (KIPI) in BIAS program.

The method of this research a normative approach (doctrinal approach), with analytical descriptive specifications to provide an overview of a relationship between legal protection for health staffs in public health services and immunization services for primary school children in BIAS program.

The results showed that under the provision of legal protection for health staffs in public health services, generally the health staffs (nurses or midwives) are given legal protection by the government, according to their authority, based on competencies, professional standards of health workers and standard operating procedures (SOP). And also under the provision of the immunization service law for primary school children in BIAS program, the primary school children are given the rights and obligations by the government to implement their human rights in obtaining immunization services at BIAS program. However in the legal provision of immunization service for primary school children in BIAS program, specially the has not been able to meet the legal protection for health staffs (nurses or midwives) in order to implement the government program, i.e. immunization services for primary school children in BIAS program.

Key words: Legal protection, nurses and midwives, immunization, BIAS program.

DAFTAR ISI

HAL

| | |
|---------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| ABSTRAK..... | x |
| ABSTRACT..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----------|
| A. LATAR BELAKANG MASALAH..... | 1 |
| B. PERUMUSAN MASALAH..... | 6 |
| C. TUJUAN PENELITIAN..... | 6 |
| D. MANFAAT PENELITIAN..... | 7 |
| 1. Manfaat Praktis..... | 7 |
| 2. Manfaat Akademis..... | 8 |
| E. METODE PENELITIAN..... | 8 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 8 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 9 |
| 3. Desain Penelitian..... | 11 |
| 4. Konsep Dan Definisi Operasional..... | 12 |
| 5. Jenis Data..... | 14 |
| a. Bahan Hukum Primer..... | 14 |
| b. Bahan Hukum Sekunder..... | 16 |
| c. Bahan Hukum Tersier..... | 16 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 6. Metode Pengumpulan Data..... | 16 |
| 7. Metode Analisis Data..... | 17 |
| 8. Rencana Penyajian Tesis..... | 17 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|-----------|
| A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT..... | 20 |
| 1. Pengantar..... | 20 |
| 2. Pengertian Tenaga Kesehatan..... | 21 |
| 3. Pengertian Hukum..... | 24 |
| 4. Tujuan Dan Fungsi Hukum..... | 27 |
| 5. Perlindungan Hukum..... | 30 |
| B. PELAYANAN IMUNISASI PADA ANAK SEKOLAH DASAR DALAM PROGRAM BIAS..... | 40 |
| 1. Pengantar..... | 40 |
| 2. Pengertian Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 41 |
| 3. Unsur-Unsur Pelayanan Kesehatan..... | 46 |
| 4. Pengertian Imunisasi..... | 48 |
| 5. Pengertian Anak Sekolah Dasar..... | 50 |
| 6. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi..... | 51 |
| 7. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)..... | 53 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----------|
| A. PENGANTAR..... | 56 |
| B. KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT..... | 57 |
| 1. Dasar Hukum..... | 57 |
| 2. Bentuk Pengaturan..... | 66 |
| 3. Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 83 |
| 4. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 85 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| a. | Hak Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 85 |
| b. | Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 96 |
| 5. | Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 112 |
| C. | KETENTUAN HUKUM TENTANG PELAYANAN IMUNISASI PADA ANAK SEKOLAH DALAM PROGRAM BIAS..... | 123 |
| 1. | Dasar Hukum..... | 123 |
| 2. | Bentuk Pengaturan..... | 138 |
| 3. | Hak Dan Kewajiban Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program Bias..... | 145 |
| a. | Hak Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS..... | 145 |
| b. | Kewajiban Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS..... | 157 |
| 4. | Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS..... | 162 |
| D. | HUBUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN IMUNISASI PADA ANAK SEKOLAH DASAR DALAM PROGRAM BIAS..... | 171 |
| 1. | Unsur-Unsur Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 171 |
| a. | Dasar Hukum..... | 171 |
| b. | Bentuk Pengaturan..... | 173 |
| c. | Tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 176 |
| d. | Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 177 |
| 1) | Hak Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 177 |
| 2) | Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 180 |

| | | |
|----|--|-----|
| e. | Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 183 |
| 2. | Unsur-Unsur Ketentuan Hukum Pelayanan Imunisasi Pada Anak Sekolah Dasar Dalam Program BIAS..... | 188 |
| a. | Dasar Hukum..... | 189 |
| b. | Bentuk Pengaturan..... | 191 |
| c. | Hak Dan Kewajiban Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS..... | 193 |
| 1) | Hak Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS..... | 193 |
| 2) | Kewajiban Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS..... | 196 |
| d. | Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS.... | 198 |
| 3. | Analisa Hubungan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dan Pelayanan Imunisasi Pada anak Sekolah Dasar Dalam Program BIAS..... | 202 |

BAB IV PENUTUP

| | | |
|----|---|-----|
| A. | KESIMPULAN..... | 204 |
| 1. | Ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 204 |
| a. | Dasar Hukum..... | 204 |
| b. | Bentuk Pengaturan..... | 206 |
| c. | Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 207 |
| d. | Hak Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 208 |
| e. | Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 210 |
| f. | Tanggung jawab Pemerintah Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat..... | 212 |

| | |
|---|------------|
| 2. Ketentuan Hukum Pelayanan Imunisasi Pada Anak Sekolah Dasar Dalam Program BIAS..... | 215 |
| a. Dasar Hukum..... | 215 |
| b. Bentuk Pengaturan..... | 216 |
| c. Hak anak sekolah dasar dalam pelayanan imunisasi Pada Program BIAS..... | 218 |
| d. Kewajiban Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada Program BIAS..... | 220 |
| e. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Sekolah Dasar Dalam Pelayanan Imunisasi Pada program BIAS... | 221 |
| 3. Hubungan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dan Pelayanan Imunisasi Pada Anak Sekolah Dasar Dalam Program BIAS..... | 224 |
| B. SARAN..... | 226 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

